

TOTALITARIANISM DALAM NOVEL *LAMPUKI* KARYA ARAFAT NUR**Eko Cahyo Prawoto**ecahyop@gmail.com**Univversitas PGRI Adi Buana Surabaya****Abstrak**

Novel *Lampuki* Karya Arafat Nur merupakan salah satu pemenang sayembara menulis novel yang diselenggarakan oleh DKJ pada tahun 2010. *Lampuki* mengisahkan lika-liku kehidupan seorang pemberontak, serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang mengarah pada pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengungkapan-pengungkapan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data dalam penelitian ini berupa kalimat serta paragraph yang menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Teknik pengumpulan data dimulai dari membaca keseluruhan novel, dilanjutkan dengan pengkodean, kemudian ditulis ulang, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekerasan secara fisik sangat mendominasi, dibandingkan dengan kekerasan kultural dan kekerasan simbolik, yang dilakukan negara maupun aparatnya. Hal ini membuktikan, bahwa pemerintahan pada masa Orde Baru memiliki ruang tanpa batas dalam mengatur segala permasalahan dengan tujuan berjalannya mekanisme-mekanisme politik, yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: totalitarianism, negara, *lampuki*

PENDAHULUAN

Novel yang dikaji dalam penelitian ini berjudul *Lampuki* karya Arafat Nur. Novel tersebut dipilih sebab menyajikan kisah yang menarik, mulai dari perselingkuhan, cinta, hingga konflik yang sarat akan realitas yang terjadi beberapa waktu lalu di bumi Aceh. Novel tersebut juga merupakan salah satu pemenang unggulan sayembara menulis novel DKJ tahun 2010. Secara singkat kisah novel tersebut dimulai dari kehidupan laki-laki bernama Ahmadi, mantan berandal yang tampil menjadi pemimpin gerilyawan, Ahmadi kerap kali menghasut para warga untuk ikut mengangkat senjata melawan aparat negara.

Selain khotbahnya yang selalu berapi-api kepada para warga, dia kerap kali membuat ulah, menyerang pos penjagaan aparat di pasar simpang lima, yang menyebabkan tewasnya beberapa anggota aparat, hal itulah yang memicu kemarahan aparat.

Ahmadi yang selalu lolos dari kejaran orang-orang berseragam, meninggalkan duka bagi warga Lampuki, yang kerap menjadi pelampiasan kemarahan aparat. Dengan segala kemarahannya, para aparat kerap kali berbuat kasar pada warga, mereka dituduh bersekongkol dengan pemberontak. Para aparat tidak segan-segan memukul, menendang, menghina bahkan membunuh warga tanpa ada alasan yang jelas. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut.

Orang-orang bersenjata itu sangat membenci roman lelaki. Cara satu-satunya agar mereka tidak melihat lagi muka jelek lelaki-lelaki di sini adalah dengan menyekap dan melenyapkan mereka; menangkap mereka secara diam-diam dan dengan bermacam alasan; mengumpulkan dan memaksa mereka menggali lubang sendiri di pinggiran hutan lalu menembak, dan membantai mereka sekalian. Itu cara paling hemat dan mudah dari segala pilihan lain untuk menghapus jejak sejarah (Nur, 2011:32)

Kekerasan yang terepresentasikan pada kutipan di atas, merupakan sebuah realitas, bahwa negara hadir dengan wajah yang berbeda. Kekuatan aparat seolah-oleh ingin mengaskan bahwa negara berhak memberikan tindakan yang bersifat represif tanpa menghiraukan sisi kemanusiaan serta keadilan. Potret yang terjadi dalam kutipan tersebut tidak saja menegaskan bahwa totalitarianism pernah hidup di bumi pertiwi, tetapi juga tumbuh dengan subur di beberapa daerah selain di pulau Jawa. Negara yang hadir pada kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa totalitarianism yang sebenarnya memiliki kekuatan tanpa batas, dalam mengatur serta mengendalikan masyarakat dengan tujuan mempertahankan kekuasaan.

Apabila melihat lebih jauh sejarah yang pernah terjadi di bumi Aceh merupakan salah satu bukti bahwa, Indonesia masih belum menjadi negara dengan sistem demokrasi yang berdiri secara utuh. Sebab, ketika berbicara demokrasi kekuasaan yang sebenarnya berasal dari rakyat. Hal itu dapat diwujudkan dengan adanya kritik-kritik yang bersal dari kalangan bawah, sebagai wujud kontrol dari pemegang kekuasaan tertinggi. Namun apabila negara dalam hal ini sudah mengabaikan prinsi-prinsip negara demokrasi, ingin melanggengkan kekuasaan jelaslah bahwa bahwa totalitarnism adalah istilah yang pas untuk menyatakan prinsip yang dianut oleh rezim seperti yang digambarkan dalam novel tersebut.

Penjelasan di depan menjadi alasan, mengapa peneliti mengangkat permasalahan totalitarism negara dalam novel Lampuki sebagai kajian, karena kekerasan yang digambarkan dalam novel tersebut mengacu pada kekerasan yang bersifat terbuka (fisik) maupun kekerasan yang bersifat tertutup (ancaman), *agresif*, dan *difensive* yang semata-mata hanya untuk merealisasikan sebuah ideologi.

1. Totalitarianism

Dalam *The origins of Totalitarianism* (1973) Hannah Arendt memperlihatkan situasi sosial politik yang memungkinkan munculnya kekuasaan totaliter. Meski Arendt merujuk pada Nazisme dan Stalinisme, bukan berarti hal itu tidak terjadi di belahan dunia yang lain, (Pitaloka, 2010:1).

Lebih lanjut Pitaloka (2010:1) menambahkan, berdasarkan pengamatan mekanisme kekuasaan yang dijalankan rezim Orde Baru memiliki kemiripan dengan kedua rezim totaliter tersebut. Berbagai peristiwa di awal berdirinya Orde Baru memperlihatkan kekuasaan negara menjadi teror yang menakutkan, seperti kasus-kasus penangkapan, pembuangan dan hukuman penjara tanpa proses pengadilan yang menimpa ratusan ribu orang, yang dianggap terlibat G30S.”

a. Tendensi-Tendensi Totaliter

Dalam kata pengantar untuk buku *Asal-Usul Totalitarianisme: Jilid III Totalitarianisme*, Magnsi-Suseno mengatakan, kita harus tetap mewaspadaai adanya tendensi-tendensi totaliter, atau potensial menjadi totaliter”. Tendensi-tendensi totaliter berupa: 1) legitimasi gampang atas pelanggaran hak asasi manusia atas nama tujuan-tujuan ideologi; 2) memonopolisasi informasi dengan alasan bahwa pemerintah lebih tahu apa yang harus dilakukan masyarakat. Pemerintah tahu apa yang boleh dan tidak boleh ditonton, dibaca, didiskusikan; 3) pembatasan pengorganisasian masyarakat pada organisasi-organisasi yang disiapkan pemerintah; 4) penggunaan cara-cara di luar hukum untuk mengancam, tidak hanya dianggap penjahat, tapi juga seluruh masyarakat, agar takut dan tidak berani mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Tendensi-tendensi totaliter lain yang diperlihatkan Arendt dalam *The origins of Totalitarianism*, terungkap dalam bentuk; 1) kekuasaan ada di tangan satu orang yang dianggap pemimpin tertinggi; 2) menerapkan sistem satu partai, menggunakan atau intel yang berfungsi mengontrol dan melakukan teror terhadap masyarakat; 3) melakukan pembersihan berulang-ulang dengan cara menerapkan paham “musuh objektif”; 4) menerapkan metode penghancuran hubungan sosial

dan keluarga melalui paham “kesalahan disebabkan oleh hubungan” dan jasa diukur dengan jumlah laporan-laporanmu mengenai teman dekat”, (Pitaloka, (2010:3-4).

Pemikiran Arendt relevan dengan situasi politik Indonesia berkaitan dengan gagasannya mengenai *banality of evil*. Lewat *Eichmann in Jerusalem: report in Banality of Evil (1963)*, Arendt mengungkapkan bagaimana negara menciptakan kejahatan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Dengan kepatuhan warga negara yang diperoleh melalui propaganda dan teror, kekerasan yang dilakukan negara dapat membuat orang menjadi enggan berpikir dan tidak mampu menilai secara kritis. Dari kedua hal tersebut, kekerasan negara kemudian menjalar pada warganya, menularkan sikap tanpa sungkan-sungkan terlibat kejahatan. Kepribadian yang lahir darinya adalah kepribadian yang diwarnai oleh mandulnya kesadaran hati nurani. Karakter semacam ini tidak melekat pada kalangan tertentu, seperti golongan birokrat, tapi juga menjangkiti masyarakat sipil, bahkan diadopsi pula oleh mereka yang menjadi korban, (Pitaloka, 2010:4).”

METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, (Moleong, 2002:3).

Sumber Data Menurut Lofland, Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Lampuki karya Arafat Nur, yang memiliki *cover* berwarna merah, dan di bagian *cover* depan tergambar sosok pria berkumis tebal yang sedang membawa senjata api. Novel tersebut memiliki 434 halaman, yang diterbitkan pada bulan Mei 2011. Novel Lampuki, merupakan salah satu pemenang unggulan sayembara menulis Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun 2010. Sedangkan data dalam penelitian ini ialah kalimat serta paragraph yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh negara sebagai wujud totalitarianism.

Metode Pengumpulan Data penelitian ini ialah metode dokumentasi Sudarmayanti dan Hidayat (2002:1986) berpendapat bahwa, dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan yang tertulis yang disusun untuk keperluan pengujian atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi, kealamianya yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti. Sejalan melakukan beberapa kegiatan dalam pengumpulan data mulai dari membaca keseluruhan teks, memberikan

pengodean, mencatat, serta menulis ulang teks atau data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Metode Analisis Data Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini adalah membaca dan menganalisis novel Lampuki karya Arafat Nur. Kegiatan ini harus dilakukan berulang-ulang agar data yang diperoleh semakin akurat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu : (1) Membaca keseluruhan isi cerita novel Lampuki karya Arafat Nur terlebih dahulu sehingga memperoleh gambaran umum tentang isi bacaan secara cermat dan berulang-ulang. (2) Berdasarkan data yang terkumpul dan telah teridentifikasi kemudian dianalisis isi bacaan sesuai dengan teori dan faktor-faktor yang membangun karya sastra secara umum dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan terperinci sesuai dengan data yang diperoleh. (3) Interpretasi yang dilakukan untuk memberikan pendapat dan penafsiran sesuai dengan kategori permasalahan dan sesuai dengan teori yang digunakan. (4) Eksplanasi merupakan penjelasan dari fakta-fakta dan penafsiran dalam proses interpretasi. (5) Pendeskripsian yang merupakan pemaparan dengan sejelas-jelasnya data-data sesuai dengan kategori kekerasan fisik. Hal tersebut dilakukan sebab menurut Bungin (2006:114) dalam riset yang berkaitan dengan ilmu sosial, hal yang paling penting adalah menentukan sesuatu yang berkaitan dengan apa atau siapa yang ditelaah. Persoalan tersebut bukan menyangkut topik riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis. Dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini disajikan pembahasan dari data yang sudah diperoleh selama dilakukan penelitian. Dari keseluruhan data yang didapatkan, data tersebut berisi tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada warga. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh negara lebih mengacu pada kekerasan fisik. Berikut ini pembahasan terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan tersebut.

1. Bentuk Kekerasan Fisik yang dilakukan Negara Pada Warga dalam Novel Lampuki.

Kekerasan merupakan sebuah tindakan represif yang disebabkan oleh pembiaran kemasabodohan, tekanan, provokasi dan hilangnya keasadaran nurani, untuk kembali ke kehidupan yang rasional. Kekerasan dapat dilakukan oleh personal, kelompok, maupun sebuah sistem (negara).

Kekerasan yang dilakukan negara, dapat dilakukan oleh aparatnya, maupun sistem itu sendiri. Misalnya, dengan peraturan-peraturan tertentu. Hal tersebut, membuktikan bahwa, kekuasaan dalam politik totaliter diciptakan bukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, akan tetapi kekuasaan digunakan untuk mngendalikan kehendak setiap individu tunggal. Akibatnya, warga negara kehilangan kemampuan berpikir secara kritis. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan negara adalah terisolirnya warga dari segala aktifitas, yang menyebabkan luka fisik dan tersendatnya proses politik, ekonomi, komunikasi. Penelitian ini, membahas ke empat implikasi kekerasan tersebut sebagai berikut.

a. Implikasi Terhadap Fisik.

“Tidak lama setelah Teungku Daud bersedia turun gunung, Karno tumbang digantikan jendral sipit berhati keji. Dialah yang melancarkan serangan dan pembunuhan-pembunuhan masal di kampung-kampung kami. Sejak itulah dimulai Tahun-Tahun Pembantaian yang merenggut begitu banyak korban penduduk yang sudah menyelamatkan negeri mereka dari kehancuran” (Nur, 2011:28-29).

Penyerangan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga, dimulai sejak bergulirnya rezim Orde Baru. Pada masa peralihan kekuasaan itulah tahun-tahun pembantaian mulai digencarkan oleh aparat, sehingga merenggut banyak korban jiwa. Kondisi sedemikian terjadi, lantaran adanya aksi pemberontakan, yang dilakukan oleh sebagian rakyat Aceh, karena, kebijakan pemerintah dirasa kurang berpihak kepada mereka. Hal itulah yang menjadi pemicu hilangnya kesadaran nurani seseorang, yang kemudian berujung pada aksi radikal.

Hal tersebut membuktikan, selain di belahan dunia lain, ternyata rakyat Indonesia juga pernah merasakan kekuasaan totaliter. Dalam prinsip kekuasaan totaliter terbagi atas empat kategori sebagai berikut. Pertama, legitimasi gampang atas pelanggaran hak asasi manusia atas nama tujuan-tujuan ideologi. Kedua, monopoli informasi dengan alasan bahwa pemerintah lebih tahu apa yang harus dielakkan masyarakat, tahu apa yang boleh ditonton, dibaca, dan didiskusikan. Ketiga, pembatasan pengorganisasian masyarakat pada organisasi-organisasi yang disiapkan pemerintah. Keempat, penggunaan cara-cara di luar hukum untuk mengancam tidak hanya yang dianggap penjahat, tapi juga seluruh masyarakat, agar takut dan tidak berani mempertanyakan kebijakan penguasa. Prinsip-prinsip itulah yang menjadikan negara memiliki kekuasaan tanpa batas, sehingga mekanisme yang sedang berjalan tidak lagi rasional dengan peraturan-peraturan

yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, kutipan dibawah ini, menggambarkan kekejaman aparat negara ketika menjalankan tugasnya.

Tubuh bugil itu diseret ke sebuah tempat dan orang-orang perkasa itu mengangkanginya secara bergantian, dengan biadab. Setelah puas, belum juga jua berakhir azab atasnya. Di dekat sebuah listrik, tubuh lemah itu disandarkan ke dinding, dan dengan amat kejinya, salah seorang menyetrum selangkanganya sampai perempuan itu pingsan berkali-kali, dan akhirnya mati kelelahan setelah tubuhnya tidak sanggup lagi menahan dera siksaan (Nur, 2011:30).

Kekejaman yang diperlihatkan oleh aparat, mencerminkan cara berpikir yang sudah tidak rasional. Sebab, nurani para aparat sudah terkontaminasi dengan doktrin-doktrin kejam penguasa. Aparat negara yang seharusnya melindungi semua masyarakat. Namun, mereka justru mengangkat senjata dan menghujangkannya ke masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa, pelanggaran atas hak-hak asasi manusia, memang sudah menjadi realitas yang lazim. Kekerasan menjadi sebuah hal yang biasa, karena hilangnya kesadaran seseorang atau sebuah sistem yang sudah dikuasai oleh penguasa totaliter, untuk berbuat kekerasan sebagai wujud dari sebuah ideologi. Anomali seperti ini akan terus berlanjut, manakala pemerintah tetap mengadopsi ideologi totaliter. Penindasan yang dilakukan oleh terus berlanjut, seperti pada kutipan berikut.

Penduduk Sagoe Peurincun yang terdiri lebih lima puluh kampung, termasuk Lampuki, berduka cita dan berkabung sampai berbulan-bulan; sampai tentara bangkit memburu sejumlah pemberontak lain yang kemudian malah menyebabkan banyak lagi penduduk yang mati terbunuh (Nur, 2011:65).

Kalau serdadu mengetahui ada orang gila semacam itu yang sedang berkeliaran di sini, niscaya habislah semua penduduk kampung, binasa laksana kumpulan hewan liar berbahaya, yang mesti segera dimusnahkan dengan membantainya sehingga tidak satu pun manusia yang boleh tersisa di kampung ini (Nur, 2011:77).

Kutipan di atas, menegaskan kekerasan negara berawal dari ideologi yang disebarkan melalui propaganda teror, sehingga menyebabkan terbunuhnya masyarakat. Kekerasan menjadi rasional dan efektif manakala ia didukung dengan statemen-statemen membenaran. Artinya, seseorang yang tidak bersalah bisa menjadi korban kekerasan, manakala sang penguasa menganggap bahwa dia bersalah. Oleh karena itu, banyak korban jiwa melayang tanpa sebab yang jelas.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat mengindikasikan bahwa, kekuasaan sedang terancam. Oleh karenanya, diperlukan kekerasan untuk tetap mempertahankan kekuasaan tersebut. Tugas para aparat yang pada awalnya hanya memburu para pemberontak, tetapi, ujungnya rakyatlah yang menjadi keganasan peluru senjata mereka. Rakyat yang sudah menderita secara ekonomi kemudian, ditambah lagi dengan penderitaan fisik. Pembantaian yang dilakukan para aparat benar-benar tidak pandang bulu.

b. Implikasi Terhadap Politik

“Beberapa lelaki malang yang tiada berdaya, harus tetap tinggal untuk melindungi dan menafkahi keluarga mereka. Namun, kemudian mereka malah menjadi sasaran kekerasan dan korban keganasan senjata. Prajurit-prajurit yang kesepian itu saban malam menggedor-gedor pintu rumah penduduk, tidak saja menembak penghuni lelaki, tetapi memaksa istri dan anak perawan mereka untuk mengangku. Sesudah itu, prajurit-prajurit jahanam itu menembaki mereka dengan tuduhan sebagai pemberontak. Sebab, sudah menjadi kepatutan bagi orang-orang itu untuk melenyapkan musuh negara” (Nur, 2011:32-33).

“Selanjutnya aku sudah muak mendengar gagasan besarnya itu sebab pada kenyataannya atas segala ulah dan tindakan bodoh yang dilakukannya bersama orang-orang sejenis komplotannya itulah hampir semua orang di ujung pulau ini kena tendang dan mencium tapak sepatu serdadu yang kerap hinggap ke tubuh dan wajah malang penduduk negeri kami” (Nur, 2011:36).

Pnindasan yang dilakukan oleh aparat, benar-benar menyiksa semua warga desa Lampuki, mereka selalu menuduh para penduduk desa sebagai pemberontak meskipun mereka hanya warga biasa. Namun, di mata para aparat mereka sama halnya dengan pemberontak. Oleh sebab itu, para tentara menembaki dan memperkosa anak dan istri para warga desa. Tidak bisa dibayangkan kesedihan yang terus-menerus menghingapi mereka, yang seakan tiada henti.

Kekerasan tersebut membuktikan bahwa, ideologi disebarkan melalui meksnisme propaganda teror. Berakibat pada, lumpuhnya nurani, dan hilangnya kemampuan masyarakat untuk selalu berpikir secara kritis, terhadap suatu kondisi tertentu. Hal inilah, yang membuat realisasi ideologi pemerintahan terlalu banyak

bercampur dengan manipulasi dan monopoli, yang sudah diramalkan sebelumnya. Kutipan di bawah ini memperlihatkan, realisasi ideologi yang penuh dengan kekerasan.

“Lantaran rakyat Negara itu memang keturunan lamit-secara harfiah bermakna hamba Tuhan-kaum yang terkenal sebagai petani dan kuli, yang selama 350 tahun menjadi budak dan kerap diinjak-injak Belanda; mereka pun hanya bisa diam dan rela diperlakukan secara zalim tanpa ada yang berusaha bangkit dan menentang penguasa buduk itu, tidak sebagaimana yang diperlihatkan kaum beringas di sini sebab kami ini memang gemar berperang. Para pemimpin negeri itu berperangai sangat buruk, lebih dari para serdadu penjajah yang busuk. Bahkan, sebagian besar pejabatnya justru berwatak lebih keji; lantaran setahuku, sejahat-jahathya pemimpin Portugis, Belanda, dan Jepang-yang pernah mencacah negeri ini-mereka tidak pernah menjajah dan menindas rakyat mereka sendiri (Nur, 2011:60-61)”

Pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan rakyatnya, terkesan hanya memanfaatkan kursi mereka untuk memperkaya diri, dan memanfaatkan keadaan demi mencari kepuasan. Menjajah rakyat dengan kekuasaan tanpa batas, dan semakin menunjukkan jati diri mereka sebagai penguasa yang terlahir dengan sifat serakah.

Dengan ideologinya penguasa merancang sebuah mekanisme, untuk menguasai masa secara terstruktur dan sistematis. Kebohongan-kebohongan yang dipublikasikan dibuat logis, agar masyarakat percaya, sehingga mudah untuk mengendalikan mereka. Jika sudah demikian, penguasa akan semakin mapan dan langgeng pada posisinya. Kutipan di bawah ini juga menunjukkan bahwa, pembantaian terus berlanjut.

“Semakin banyak prajurit terbunuh, semakin banyak pula bala tentara dilimpahkan kemari untuk memburu gerilyawan yang pada akhirnya malah menyengsarakan penduduk. Budak-budak pemerintah itu akan semakin leluasa meluluhlantahkan apa saja yang mereka temui, tanpa perlu besusah payah mengutarakan bermacam alasan untuk memukul dan membunuh siapa saja yang mengesalkan hati mereka. Seperti anak-anak lemah, belacu merah di lengan baju mereka mengenali betul medan gerilya, mereka cuma menyerang penduduk dan membakar rumah-rumah kala putus asa tidak bisa membalaskan dendam atas kematian teman-temannya” (Nur, 2011:104).

Dalam kenyataannya yang disebut dengan sebuah ideologi pemeritahan, tidak pernah terlepas dari lingkaran politik, dan politik itu sendiri sebenarnya merupakan kebohongan-kebohongan yang mendapatkan legitimasi. Kebohongan menjadi sebuah hal yang dibenarkan, dengan menambahkan sifat-sifat keilmiah. Artinya, pemerintah menyampaikan jargon-jargon dengan sangat sistematis dan dengan perhitungan yang matang, sehingga mudah mendapatkan pembenaran dari masyarakat.

c. Implikasi Terhadap Ekonomi

Setelahnya, betapa banyak bala tentara yang dilimpahkan kemari pada tahun-tahun berdarah yang penuh kekejian dan memburu sejumlah pengikut Hasan Tiro. Hasan adalah lelaki yang menyandang banyak harapan dan angan-angan panjang yang muncul kemudian setelah Teungku Daud mangkat. Pada masa itu kampung-kampung berubah sunyi, sangat mencekam bila datang malam. Serdadu menjarah harta benda, menangkapi penduduk, dan secara merajalela menculik ratusan orang. Tengah malam buta mereka datang mengetuk pintu lalu meminta lelaki sebagai tumbal (Hal 29).

Masih melekat di ingatan orang-orang kala ribuan serdadu berkeliaran di sejumlah kampung. Mereka memburu pemberontak sambil mencari-cari senjata, menyungkit lemari dan membongkar kotak perhiasan. Uang dan perhiasan itulah yang mereka sita sebagai pengganti senjata yang tidak pernah mereka temukan di rumah-rumah penduduk (Nur, 2011:30).

Penyerangan tidak berhenti pada siang hari. Ketika malam tiba para aparat memulai aksinya kembali untuk memburu para pemberontak, yang menyebabkan suasana di kampung Lampuki dan sekitarnya berubah menjadi sunyi dan mencekam. Menimbulkan kecemasan luar biasa bagi warga Lampuki. Secara tidak langsung, para aparat telah mengisolir proses-proses ekonomi. Kekerasan membuat warga menjadi enggan untuk melakukan transaksi. Selain itu, para aparat juga menjarah kekayaan para warga, dengan berbagai alasan. Hal tersebut membuktikan, tidak ada ruang publik untuk, memberikan keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas warga, yang berakibat pada macetnya perekonomian mereka.

Begitulah, berbilang tahun kekayaan bumi di bumi pasai terus dikeruk dan diangkut tanpa henti, tanpa memandang kesengsaraan penduduk dan ulah dari semua petaka yang mereka ciptakan di sini. Semua hasilnya habis

digunakan untuk kepentingan pembangunan di pusat pemerintahan, dan sebagaimana lagi digelapkan oleh sekelompok pejabat tinggi yang kemudian menjadi kaya raya di tengah penduduk yang terjangkit busung lapar. Sejumlah pemimpin ternyata diam-diam menjajah kaumnya sendiri dan keadaan rakyat mereka pun tiada beda dengan keadaan kami di sini (Nur, 2011:36).

Penguasa totaliter adalah penguasa rakus, membuat sebuah kebijakan , yang berorientasi pada penggelembungan dana di rekening para birokrat. Ideologi totaliter membatasi setiap aktifitas yang dianggap membahayakan kekuasaan. Sehingga, dengan kekerasan para birokrat bisa berlama-lama duduk di kursi mereka, tanpa menghiraukan jeritan-jeritan yang semakin hari semakin keras, di ruang-ruang pemerintahan. Dapat dipahami, kekerasan sebenarnya berawal dari kursi-kursi politik, dengan kebijakannya yang seakan-akan buta dengan kondisi rakyat, sehingga, meyebabkan perekonomian kian kritis. Hal itulah yang memicu, lahirnya karakter-karakter radikal sebagai sebuah pelarian. Aksi-aksi radikal dianggap menjadi sebuah solusi ketika, masyarakat ditenggelamkan dalam kubangan penuh nista yang diperlihatkan oleh penguasa.

d. Implikasi Terhadap Komunikasi

Begitu tiba di Pasar Simpang mereka berteriak-teriak, bersorak-sorak sambil melepaskan tembakan ke udara, menembaki awan di atas sana. Dari kelakuan macam itu, jelas sekali bahwa gelagat mereka memang hendak membantai penduduk, menganggap kampung ini sama halnya dengan kampung pelosok yang bisa mereka perlakukan sesuka hati agar penduduk kampung ini tahu diri (Nur, 2011:202).

Jika pun ada orang menjelaskan bahwa semua yang terjadi itu bukanlah kesalahan penduduk, para serdadu tidak bakal peduli. Kesalahan tetap dilimpahkan sepenuhnya kepada penduduk kampung ini sebab tentara meyakini, dari sinilah awal mula semua bencana itu disusun. Para prajurit itu mengetahui bahwa petaka menimpa mereka semuanya berpunca dari pangkal kumis Ahmadi (Nur, 2011:202).

Kutipan di atas, menggambarkan realitas kekerasan yang dilakukan oleh aparat, tidak saja mengacu pada fisik, namun juga merujuk pada pelanggaran hak untuk bersuara. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa, kekuasaan pada masa Orde Baru, tidak memberi kebebasan bersuara, terutama dalam mengkritisi kebijakan. Ideologi totaliter hanya memberikan ruang-ruang diskusi pada

kelompok mereka. Namun, ketika kebijakan tersebut direalisasikan, maka dalam pelaksanaannya akan kembali ke tangan besi. Kutipan di bawah ini, juga menunjukkan hal yang sedemikian.

Entah apa yang terjadi dan entah apa gerangan sebabnya, tetapi hari ini mereka datang beserta bekal kemarahan yang telah mereka simpan sejak hari penyerangan. Mereka muncul dengan muka geram menebarkan bibit bencana(Nur, 2011:203).

Manakala menyelusuri pemukiman penduduk, pembawaan mereka semakin senewen, sebab-tentu saja mereka tiada menemukan pelaku yang telah merusak truk mereka. Tuduhan pun dilimpahkan kepada semua orang Lampuki yang mereka tuding sebagai pembangkang, yang telah menyerang truk pasukan mereka. Sikap para lelaki malang kampung ini amatlah serba salah, tiada artinya sama sekali membela diri atau membantah. Lebih parah lagi kalau mengakui tuduhan. Maka, lebih baik dan lebih bijak menundukkan kepala saja sambil menerima serapahan, bersikap seperti orang menyesali diri dan merasa amat berdosa sekalipun mereka tahu bukan penduduk yang melakukan pencelakaan itu (Nur, 2011:204).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui selain menebar ancaman, para aparat juga menuding semua warga sebagai peberontak. Kekerasan tersebut, juga menunjukkan bahwa, tidak ada pembelaan warga yang mereka anggap benar, jika pun mereka berbeda pendapat, maka sama halnya dengan membunuh diri sendiri. Rezim totaliter, adalah sebuah sistem yang menganut kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin tunggal. Semua hal yang berkaitan dengan kebijakan, hanya diputuskan oleh penguasa tunggal. Hal inilah yang menyebabkan tertutupnya ruang publik untuk beraspirasi. Kutipan di bawah ini juga memberikan gambaran, tentang sikap main hakim sendiri yang ditunjukkan oleh aparat.

Rupanya si prajurit tak bisa menerima dan terhina oleh sikap Sulaiman yang melindungi anak gadisnya dari kejahatan. Prajurit nakal itu balik ke pos dengan raut muka padam dan tak lama kemudian kembali lagi dengan membawa dua kawanya untuk menunjukkan kesungguhannya. Lalu, tanpa disangka-sangka dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah yang sedang mereka hadapi, bandit-bandit itu langsung mengeroyok Sulaiman, menuduh kepala tukang itu sebagai si Kumis Tebal, sekalipun semua orang melihat bahwa kumis lelaki itu tergolong tipis benar. Atas

tuduhan itu pula, Sulaiman babak belur kena hajar dan hantaman, tak ada artinya dia bersusah payah mengajukan pembelaan” (Nur, 2011:302-303).

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat membentuk sebuah paradigma bahwa, slogan demokrasi hanyalah isapan jempol, kebohongan yang dibarengi dengan tindak kekerasan mampu menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi, yakni kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Hak-hak untuk menyampaikan pendapat, tertutup oleh tebalnya dinding-dinding totaliter. Hal inilah yang membuat rezim Orde Baru mampu mempertahankan kedaulatannya hingga puluhan tahun.

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di depan dapat disimpulkan bahwa, kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, dianggap sebagai sebuah tindakan negara. Negara yang menganut prinsip-prinsip totaliter akan menggunakan kekerasan untuk menegakkan peraturan dan hukum, tidak untuk membatasi kekuasaannya, namun sebaliknya, rezim totaliter menerapkan peraturan dan hukum-hukumnya untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, fungsi negara sebagai sebuah sistem tertinggi, tidak lagi memegang teguh dasar-dasar Pancasila, karena banyak hak-hak asasi manusia yang sudah dimanipulasi, demi mementingkan personal dan kelompok penguasa.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, M.A, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, Arafat. 2011. *Lampuki*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Pitaloka, Rieke Diah. 2010. *Banalitas Kekerasan*. Depok: Koekoesan.
- Sudarmayanti dan Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.